

KKP Libatkan Calon Penerima Kapal Perikanan Bantuan Pemerintah

Dampak dari hasil dan kebijakan pemberantasan **IUU fishing** telah dirasakan manfaatnya yaitu melimpahnya sumber daya ikan sehingga nelayan lebih dekat dan lebih mudah menangkap ikan. Permasalahan yang terjadi sebagian nelayan yaitu masih sulit dan terbatasnya sarana penangkapan



ikan yang dimiliki untuk mengakses serta memanfaatkan sumber daya ikan tersebut. Untuk itu, pemerintah hadir membantu melalui program bantuan kapal perikanan untuk mengurangi permasalahan dan kesenjangan tersebut.

Selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 jumlah bantuan KKP yang disalurkan sebanyak 2.215 unit kapal dengan berbagai type dan ukuran yang diberikan kepada Koperasi nelayan yang tersebar diseluruh Indonesia. Perkembangan program pengadaan kapal perikanan bantuan tahun 2019 sebanyak 300 unit saat ini beberapa dalam proses tender dan sebagian dalam proses pembangunan di beberapa galangan/penyedia. Pembangunan kapal perikanan ini ditargetkan akan tuntas pada Bulan akhir November 2019.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, M. Zulficar Mochtar memaparkan berbagai langkah dan terobosan pelaksanaan program bantuan kapal perikanan terus dilakukan. Salah satunya melalui pendekatan serta penerapan asas keberterimaan dan keterlibatan calon penerima dalam merencanakan dan mengadakan kapal bantuan. Asas perencanaan kapal bantuan melalui pendekatan “keberterimaan” bertujuan agar pada saat kapal diserahkan tidak ada penolakan yang diakibatkan karena kapal yang dibangun tidak sesuai dengan kebutuhan penerima.

Pelaksanaan konkrit dari asas tersebut bertempat di galangan Ronie Marine Kabupaten Cilacap Jawa Tengah selama tiga hari (15-17 Agustus 2019). Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) melalui Direktorat Kapal Perikana dan Alat Penangkapan ikan pada tahap pertama



mengajak sebanyak 30 perwakilan koperasi nelayan calon penerima penerima kapal dan perwakilan dinas perikanan masing-masing diundang guna melakukan uji coba melaut (sea trial) kapal bantuan yang nantinya akan diserahkan.

“Belajar dari pengalaman sebelumnya agar tidak terjadi penolakan maka dilakukan uji coba terlebih dahulu oleh penerima kalo ada yang kurang sesuai segera dilakukan perbaikan sehingga kapal

pada saat diterima benar-benar sudah sesuai, hal ini juga berguna untuk meningkatkan **“sense of**

belonging” calon penerima,” ujar Zulficar.

Keterlibatan calon penerima bantuan dalam setiap tahapan pengadaan kapal yaitu mulai memilih desain kapal, mesin dan alat penangkapan ikan yang sesuai dengan kebutuhannya sampai dengan proses pembangunan diundang ke galangan untuk melihat prosesnya hingga *sea trial*. Hal ini dimaksudkan agar calon penerima bantuan benar-benar ada rasa memiliki dan tercipta suasana bahwa kapal tersebut milik mereka sendiri.

“Program bantuan kapal ini juga tidak hanya dirasakan langsung oleh nelayan penerima namun ada *multiplier effect* yaitu membangkitkan galangan kapal ikan nasional, penyerapan tenaga kerja disekitar lokasi galangan dan industri pendukung seperti material, perlengkapan kapal dan seterusnya serta yang tidak kalah penting adanya transfer knowledge pembuatan kapal dengan bahan sintesis yaitu *Fibreglass Reinforced Plastic (FRP)*,” imbuh Zulficar.

Secara terpisah, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Goenaryo menyampaikan bahwa pengadaan kapal bantuan ini tidak hanya mengadakan fisik kapalnya saja namun sudah dilengkapi dengan dokumen kapal. Nelayan juga akan dilatih untuk mendapatkan sertifikat SKK 30/60 Mil serta ketrampilan penanganan hasil tangkapan, sehingga kapal diserahterimakan langsung bisa operasional.

“Tidak hanya berhenti disitu, upaya membantu calon penerima terus dilakukan termasuk pasca serah terima kapal akan difasilitasi dengan permodalan dan pelatihan pemeliharaan mesin maupun kapal jika terjadi kerusakan, agar penerima benar-benar mandiri,” tandasnya.